



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2023-2024
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 2
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Tingkat I
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 21 Agustus 2023
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Rapat Kerja Tk.I Pembicaraan Pendahuluan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu kota Negara (IKN), dengan susunan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">1. Pengantar Ketua Rapat;2. Penjelasan/keterangan Pemerintah;3. Pengantar/Pandangan Fraksi-fraksi DPR RI dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;4. Penyerahan Rancangan Undang-Undang;5. Pembentukan Panja.
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Mahmud, S.E./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 26 (dua puluh enam) Anggota Komisi II DPR RI dari 47 (empat puluh tujuh) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri PPN/ Kepala BAPPENAS RI; C. Menteri Dalam Negeri RI; D. Menteri Keuangan RI; E. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI; F. Menteri Hukum dan HAM RI; G. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara; H. Pimpinan DPD RI.

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja Tingkat I Komisi II DPR RI dengan Menteri PPN/Bappenas RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, dan Pimpinan DPD RU, dengan agenda Rapat Kerja Tk.I Pembicaraan Pendahuluan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu kota Negara (IKN), dengan susunan, yaitu Pengantar Ketua Rapat, Penjelasan/keterangan Pemerintah, Pengantar/Pandangan Fraksi-fraksi DPR RI dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Penyerahan Rancangan Undang-Undang, dan Pembentukan Panja, pada hari Senin, 21 Agustus 2023, dibuka pukul 14.20 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Kerja Tingkat I Komisi II DPR RI dengan Menteri PPN/Bappenas RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, dan Pimpinan DPD RU, dengan agenda Rapat Kerja Tk.I Pembicaraan Pendahuluan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu kota Negara (IKN), dengan susunan, yaitu Pengantar Ketua Rapat, Penjelasan/keterangan Pemerintah, Pengantar/Pandangan Fraksi-fraksi DPR RI dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Penyerahan Rancangan Undang-Undang, dan Pembentukan Panja, sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R-32/Pres/06/2023 tanggal 19 Juni 2023, perihal; Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Presiden Republik Indonesia menugaskan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Hukum dan HAM, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk mewakili Pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut.

Serta berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 5 Juli 2023, dengan Surat dari Pimpinan DPR RI Nomor: T/476/PW.11.01/07/2023 memutuskan dan menyetujui bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara diserahkan kepada Komisi II DPR RI.

III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat pada Rapat Kerja Tingkat I Komisi II DPR RI dengan Menteri PPN/Bappenas RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, dan Pimpinan DPD RU, dengan agenda Rapat Kerja Tk.I Pembicaraan Pendahuluan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu kota Negara (IKN), dengan susunan, yaitu Pengantar Ketua Rapat, Penjelasan/keterangan Pemerintah, Pengantar/Pandangan Fraksi-fraksi DPR RI dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Penyerahan Rancangan Undang-Undang, dan Pembentukan Panja, sebagai berikut:

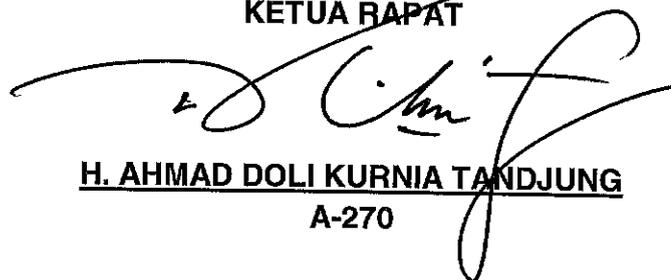
1. Komisi II DPR RI telah mendengarkan penjelasan/pandangan dari Pemerintah, Fraksi-Fraksi DPR RI, dan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu kota Negara (IKN).
2. Pemerintah menyerahkan Rancangan Undang-Undang kepada Komisi II DPR RI dan akan dibahas dalam Panja.
3. Komisi II DPR RI menyetujui pembentukan Panja Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu kota Negara (IKN).
4. Komisi II DPR RI meminta kepada setiap Fraksi melalui Kapoksi untuk dapat menyerahkan DIM kepada sekretariat Komisi II paling telat tanggal **30 Agustus 2023**.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.52 WIB.

Jakarta, 21 Agustus 2023

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG

A-270